

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU  
JASA TITIPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 102  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN**

Oleh

**Finna Septiani**

**41151010160085**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2020**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CUSTODIAN  
SERVICE CUSTOMER WITH ARTICLE 102 LAW  
NUMBER 17 OF 2006 CONCERNING  
AMANDEMENTS TO LAW NUMBER 10 OF 1995  
CONCERNING CUSTOMS***

*By*

**Finna Septiani**

**41151010160085**

**Skripsi**

*To meet any of the exam requirements to obtain a bachelor of law degree*

*in the law study program*



***FACULTY OF LAW***

***UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA***

**BANDUNG**

**2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Finna Septiani

NPM : 41151010160085

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Jasa Titipan  
Dihubungkan Dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor  
17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Finna Septiani

41151010160085

## ABSTRAK

Berubahnya perilaku masyarakat dalam memenuhi gaya hidup konsumtif karena berkembangnya teknologi berimbas kepada banyaknya pelaku usaha jasa titipan yang melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan. Mereka sering memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk, padahal seharusnya fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha. Pelaku jasa titipan juga merugikan pengusaha retail dalam negeri karena persaingan tidak sehat, serta merugikan negara karena tidak terpenuhinya bea masuk dan pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha jasa titipan dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian, deskriptif analitis yang memberikan gambaran penyelundupan yang dilakukan pelaku usaha jasa titipan. Tahap penelitian, studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data, yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku jasa titipan seringkali tidak diterapkan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dikarenakan adanya faktor penyebab pasal tersebut tidak dapat diterapkan seperti unsur pasal yang tidak terpenuhi atau kurangnya barang bukti. Untuk menanggulangi penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan, dilakukan upaya preventif dan represif oleh bea cukai. Penegakan hukum terhadap pelaku jasa titipan harus ditegakkan sesuai ketentuan yang ada dengan mengacu kepada Undang-Undang Kepabeanan khususnya Pasal 102 terkait dengan penyelundupan dibidang impor sehingga dapat memberikan efek jera, serta untuk menanggulangi penyelundupan, diperlukan sosialisasi lebih giat lagi dan dukungan dari masyarakat khususnya pelaku usaha jasa titipan.

## **ABSTRACT**

*Changes in people's behavior in fulfilling the consumptive lifestyle conducting business activities contrary to the regulations. They often take advantage of import duty exemption facility, even though the business people shouldn't have used the facility. Custodian service actors also harm domestic retail entrepreneurs because of unfair competition, and cause losses to the state because import duties and other taxes are not fulfilled. This study aims to determine and analyze how law enforcement against entrusted business actors in relation to Article 102 of Law number 17 of 2006 concerning Amendments to Law number 10 of 1995 concerning customs and the efforts made to tackle smuggling carried out by business actors on entrusted services.*

*The research method used is normative juridical with research specifications, analytical descriptive which provides an overview of smuggling carried out by entrusted business actors. The research stage used literature study with primary legal materials that's Law number 17 of 2006 concerning Amendments to Law number 10 of 1995 concerning customs. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. As well as, data analysis, juridical qualitative, namely research that refers to legal norms contained in various laws and regulations.*

*The study results indicate that law enforcement against custodians is often not implemented based on Article 102 of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, due to factors that cause these articles cannot be applied such as the elements of the articles which not fulfilled or lack of evidence. To tackle the smuggling carried out by custodians, preventive and repressive efforts are made by customs. Law enforcement against entrusted service actors must be enforced according to existing provisions with reference to the Customs Law, especially Article 102 related to smuggling in the import sector so that it can provide a deterrent effect, and to tackle smuggling, more active socialization and support from the community, especially business actors that is custodian service, are needed.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU JASA TITIPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN”.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dani Durahman, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang dengan sabar dan tabah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S. H., M. H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S. H., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S. H., M. H., selaku Kepala Lab Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Inda Nurdahniar, S. H., M. Hum., selaku Dosen Wali penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam memenuhi segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, Dinda Fahriddha Firdaus, Karina Damayanti Sudrajat, Virda Vebrianti, Intan Ramadhanti Azaby, Revi Suci Rahmatika, Dani Rizki, Rizal Yusanta, Fauzan Nurmukhlis, dan M. Irwan Ramadhan, terimakasih banyak atas dukungan, bantuannya selama ini dan telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan positif kepada penulis.

13. Teman seperjuangan penulis di kelas A2 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

14. Keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Kabinet Giustinia.

Terimakasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibu Ratnaningsih, Bapak Agus Mulyadi, Kakak Imas Fitria serta Adik Ganny Ferdiansyah dan Ronna Ferdiansyah. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terimakasih atas segala pengorbanan baik materil maupun moril. Banyak pihak lain yang juga berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca, *Aamiin. Wassalamu'alaikum warohmatullohiwabarokatuh.*

Bandung, September 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, KEPABEANAN, TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN JASA TITIPAN</b> .....	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	17
B. Kepabeanan .....	28
C. Tindak Pidana Penyelundupan .....	31
D. Jasa Titipan .....	44
<b>BAB III KASUS PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN BARANG YANG DILAKUKAN PELAKU JASA TITIPAN</b> .....	48

A. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh Pelaku berinisial TLS dan VA .....	48
B. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh Pelaku dengan Inisial NK .....	49
C. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh Pelaku dengan Inisial SD, YW dan F .....	49

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU JASA  
TITIPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 102 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG  
KEPABEANAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAKU JASA TITIPAN .....**

A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Jasa Titipan Dihubungkan Dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan .....	51
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Jasa Titipan .....	57

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**